

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelapor dan/atau kelompok terlapor pelanggaran pemilu pada tahun 2019.

1. Kesulitan dalam penegakan hukum pemilu dapat dilihat pada bidang-bidang tertentu dari proses pemilihan umum. Penuntutan berhasil atau gagal, tergantung pada sistem hukum dan sistem perilaku manusia yang sebenarnya. Bahkan penerapan hukuman pemilu nomor transisi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan dalam undang-undang pemilu, terutama dalam kasus penyimpangan pemilu. Kemudian masalah teknis aparat penegak hukum, termasuk pemantau pemilu, polisi, kejaksaan, dan hakim agung, serta praktik hukum persiapan pemilu yang tidak sehat. Pada tataran umum, undang-undang tersebut belum jelas dan sepenuhnya tepat untuk mengatur hukum formal. Yang terpenting, para pemangku kepentingan, tampaknya masih memiliki sihir dogartaaan untuk mencegah penuntutan. Komunitas politik tidak menyadari perlunya pemilu atas undang-undang yang ada, tetapi hal itu menciptakan pandangan yang menyimpang dari undang-undang yang ada. Akibatnya, dugaan kecurangan pemilu tidak diselidiki dengan benar.
2. Dalam hal pengawasan pengadilan terhadap hasil dan laporan pelanggaran setelah putusan, putusan tersebut tidak diumumkan dan tidak hanya disebutkan dalam peraturan Bawaslu, tetapi tanpa kewenangan hukum lama prosesnya adalah 14 hari. Jadi ada perbedaan hukum dalam penilaian. Situasi seperti itu menyebabkan efektifitas implementasi UU Pilkada di wilayah kepulauan,

khususnya di Batam, seolah-olah memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyembunyikan dan mengelak dari undang-undang tersebut. Tombol Pemantau Pemilu 2019 akan diterapkan untuk mencegah kejahatan yang tertanam dalam politik. Undang-undang pemilu Xilliga, kegiatan pemantauan pemilu hanya ditujukan untuk memperkuat sektor-sektor kunci intervensi. Tombol pemantauan pemilihan Tombol ajaib untuk memblokir kebijakan moneter adalah hal biasa, dan inklusi berkelanjutan serta penggunaan langkah-langkah terbatas untuk mengekang kebijakan moneter tidak cukup. Panwaslu Kota Batam tidak berwenang memperlambat UU TPPU.

5.2. Saran

1. Berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk ukuran pulau dan masalah migrasi, telah menjadi bagian dari waktu untuk menangani dugaan kecurangan pemilu dan waktu perjalanan ke lokasi pelanggaran. Kolektif aparat penegak hukum masih sulit dijangkau karena kasus individu dijatuhkan tanpa pandang bulu. Diperlukan untuk menangani pelanggaran pencucian uang, misalnya, untuk membuat pelanggaran kebijakan moneter dapat digunakan sebagai kompensasi atas ancaman pidana berat untuk menyembunyikan tujuan hukuman dan mempengaruhi masyarakat. gaya penyiksaan di looga menghalangi pelaksanaan pemilihan umum. Kekuatan perjuangan untuk impunitas adalah bahwa komisi pemilihan harus melakukan kampanye sosialis dan media besar-besaran sehingga orang menolak kebijakan fiskal selama pemilihan. Mengembangkan sistem undang-undang pemilu dengan mengamandemen undang-undang pemilu, mengecualikan pilihan kontrol atas

kecurangan dan kekerasan dan menerapkan sistem karakteristik perlawanan melalui solusi sistem untuk mengatasi pelanggaran tata kelola pemilu.

2. Meskipun pengendalian kecurangan pemilu dalam UU Pemilu masih ada, namun dari segi efektifitas penegakan hukum yang relevan dalam menangani penyimpangan pemilu, yaitu penggunaannya tidak lagi mengacu pada undang-undang pemilu tetapi sampai batas waktu yang ditentukan dalam Kode Etik. - Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jawabannya, langkah efektif untuk mengatasi masalah kecurangan looga ini bertujuan untuk menyelesaikan sistem penanganan pelanggaran administrasi pemilu seperti sanksi berat terhadap peserta atau calon yang telah mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan pemilu. Pada saat yang sama, pelakunya disebut kejahatan umum di bawah KUHP, yang disebut "pemutusan jangka pendek". Ini berarti bahwa hukuman pidana digunakan ketika hukuman lain tidak efektif. Dengan kata lain, KUHP mencantumkan hukuman terbaru, diikuti oleh hukuman perdata, serta hukuman administratif.

